



Penguatan Digitalisasi Transaksi UMKM Desa Sukajaya melalui Implementasi *QRIS* yang Aman dan Terintegrasi

Nabil Zulpi Apriyansyah¹, Rakyeon Aldi Daneswara², Ahmad Wibi Nugraha³, Gian Tusan Bazari⁴, Zihan Az Zahra⁵, Inten Risna⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Bina Bangsa, Kota Serang

*Email Corresponding Author: nzulpiapriyansyah01@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi pembayaran dapat memperluas pilihan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi penerapannya memerlukan kesiapan perangkat, pemahaman alur pembayaran, keamanan, dan pencatatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi UMKM Desa Sukajaya dalam mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alternatif pembayaran nontunai. Metode kegiatan menggunakan alur Petakan–Aktifkan–Simulasikan–Amankan–Catat. Tahap Petakan mengidentifikasi pola transaksi dan kesiapan mitra; Aktifkan memfasilitasi proses melalui penyelenggara jasa pembayaran berizin; Simulasikan melatih pemindaian, verifikasi nominal, dan pemeriksaan status; Amankan membahas perlindungan PIN, OTP, akun, serta kewaspadaan terhadap bukti transfer palsu; dan Catat mengintegrasikan transaksi QRIS ke pencatatan penjualan. Hasil pendampingan berupa kesiapan penggunaan QRIS, pemahaman alur penerimaan pembayaran, prosedur verifikasi transaksi, serta format pencatatan sederhana. Dokumentasi menunjukkan keterlibatan mitra dan tim dalam pelaksanaan kegiatan. QRIS diposisikan sebagai pelengkap pembayaran tunai, bukan pengganti tunggal, sehingga keputusan penggunaannya tetap mempertimbangkan preferensi pelanggan dan kualitas konektivitas. Kegiatan belum mengukur perubahan omzet atau frekuensi transaksi dalam jangka panjang. Evaluasi lanjutan perlu membandingkan jumlah transaksi, nilai penjualan, kesalahan pencatatan, dan pengalaman pelanggan sebelum serta sesudah implementasi.

Kata Kunci: digitalisasi transaksi, keamanan pembayaran, pencatatan usaha, QRIS, UMKM desa

Abstract

Payment digitalization can broaden transaction options for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), yet its implementation requires device readiness, understanding of payment flows, security, and recordkeeping. This community service activity aimed to assist MSMEs in Sukajaya Village in implementing the Quick Response Code Indonesian Standard

(QRIS) as a non-cash payment alternative. The activity used a Map–Activate–Simulate–Secure–Record sequence. Map identified transaction patterns and partner readiness; Activate facilitated the process through a licensed payment service provider; Simulate practiced scanning, nominal verification, and transaction-status checking; Secure addressed the protection of PINs, one-time passwords, and accounts as well as awareness of false payment evidence; and Record integrated QRIS transactions into simple sales records. The activity resulted in readiness to use QRIS, understanding of the payment acceptance flow, transaction-verification procedures, and a basic recording format. Documentation demonstrates partner and team participation. QRIS was positioned as a complement to cash rather than its sole replacement, considering customer preferences and connectivity. The activity did not measure long-term changes in turnover or transaction frequency. Follow-up evaluation should compare transaction volumes, sales values, recording errors, and customer experiences before and after implementation.

Keywords: transaction digitalization, payment security, business records, QRIS, village MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, menggerakkan produksi lokal, serta menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan perlunya pemberdayaan UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan, serta penciptaan iklim yang mendukung. Dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi, kemampuan menerima dan mengelola pembayaran nontunai menjadi salah satu bentuk kesiapan usaha yang perlu diperkuat. Perubahan perilaku konsumen memengaruhi cara transaksi berlangsung. Uang tunai masih penting, khususnya pada pasar lokal, tetapi konsumen juga menggunakan aplikasi perbankan dan dompet digital untuk membayar. Bagi UMKM, hanya menyediakan satu jenis pembayaran dapat mengurangi keluwesan pelayanan. Pilihan nontunai memungkinkan konsumen bertransaksi tanpa menyiapkan uang pas, sedangkan pelaku usaha memperoleh catatan elektronik dari penyedia layanan. Manfaat tersebut tidak hadir secara otomatis karena transaksi tetap harus diverifikasi dan dicatat sebagai bagian dari pengelolaan usaha.

Digitalisasi UMKM bukan sekadar memindahkan aktivitas dari bentuk manual ke layar. OECD (2021) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat membantu usaha kecil meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan daya saing, tetapi kesenjangan keterampilan, investasi, serta organisasi masih menjadi hambatan. Dalam konteks pembayaran, keberadaan kode QR belum cukup jika pelaku usaha belum memahami cara mengecek status transaksi, membedakan notifikasi yang sah, menangani gangguan jaringan, dan merekonsiliasi penerimaan dengan penjualan. Bank Indonesia memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai standar nasional QR Code pembayaran untuk memfasilitasi transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Standardisasi diperlukan karena sebelumnya penyedia

layanan dapat menggunakan kode yang berbeda. Melalui satu standar, merchant dapat menerima pembayaran dari aplikasi pengguna yang terhubung dengan ekosistem QRIS sesuai ketentuan penyelenggaraannya. Landasan implementasi awal ditetapkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. QRIS perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pembayaran, bukan sekadar gambar kode. Transaksi melibatkan konsumen, merchant, penyelenggara jasa pembayaran, lembaga switching, serta infrastruktur yang memproses dan menyelesaikan dana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengatur penyelenggaraan aktivitas pembayaran, termasuk aspek perizinan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Karena itu, proses aktivasi merchant semestinya dilakukan melalui penyelenggara yang berizin dan mengikuti prosedur verifikasi yang berlaku.

Dari sisi inklusi keuangan, pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha terhubung dengan layanan keuangan formal. World Bank (2022) melalui Global Findex 2021 menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital berkembang secara luas dan menjadi pintu masuk bagi pemanfaatan layanan keuangan lainnya. Namun, akses tidak identik dengan kemampuan. Pengguna perlu memiliki literasi digital dan keuangan agar mampu memahami biaya, menjaga kredensial, membaca riwayat transaksi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi.

Bagi UMKM desa, manfaat operasional QRIS setidaknya berada pada empat area. Pertama, pilihan pembayaran dapat meningkatkan kenyamanan konsumen. Kedua, pelaku usaha tidak perlu menyediakan uang kembalian untuk transaksi nontunai. Ketiga, riwayat pada aplikasi merchant dapat membantu penelusuran penerimaan. Keempat, kode QR dapat digunakan pada titik usaha atau kegiatan penjualan bergerak. Walaupun demikian, manfaat tersebut dipengaruhi oleh konektivitas, ketersediaan perangkat, kebiasaan pelanggan, biaya layanan, dan disiplin pencatatan. Pencatatan menjadi isu penting karena saldo masuk bukan selalu sama dengan laba. Pelaku usaha perlu memisahkan nilai penjualan, biaya, modal, penarikan pribadi, dan potongan yang mungkin berlaku. Jika transaksi tunai dan QRIS tidak digabungkan dalam satu catatan, pemilik usaha dapat memperoleh gambaran yang tidak lengkap mengenai omzet. Pendampingan pembayaran digital karena itu perlu terhubung dengan pencatatan sederhana, bukan berhenti pada pemasangan kode. Keamanan transaksi juga membutuhkan perhatian khusus. Pelaku usaha tidak boleh hanya mengandalkan tangkapan layar atau tampilan pada telepon pelanggan sebagai bukti pembayaran. Status perlu diperiksa melalui notifikasi atau riwayat pada aplikasi merchant. PIN dan kata sandi tidak boleh dibagikan; kode OTP tidak boleh diberikan kepada pihak lain; tautan yang meminta kredensial harus dicurigai; dan perubahan identitas akun perlu dilakukan melalui kanal resmi. Prinsip ini selaras dengan perlindungan konsumen pada sektor sistem pembayaran yang menekankan keamanan, transparansi, serta penanganan pengaduan.

Kesalahan manusia dapat terjadi pada tahap input nominal, pemilihan sumber dana, verifikasi, atau pencatatan. Pada QRIS statis, pelanggan memasukkan nominal sehingga merchant perlu memeriksa kesesuaiannya. Pada mekanisme dinamis, nominal dapat dibuat

melalui sistem merchant, tetapi penggunaannya bergantung pada fasilitas penyedia. Pemahaman atas perbedaan ini membantu pelaku usaha memilih prosedur yang sesuai dan mengurangi risiko penerimaan dengan nominal keliru.

UMKM di Desa Sukajaya membutuhkan penguatan kapasitas pembayaran digital yang bersifat praktis. Dokumentasi kegiatan menunjukkan pelaku usaha bersama tim pendamping pada lokasi usaha. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengabdian yang tidak hanya mengenalkan pengertian QRIS, tetapi menempatkan pemilik usaha sebagai pengguna yang harus mampu menjalankan, mengamankan, dan mencatat transaksi. Proses dilakukan melalui dialog, fasilitasi, demonstrasi, simulasi, serta penyusunan prosedur sederhana. Permasalahan kegiatan dirumuskan sebagai berikut: (1) pilihan pembayaran usaha perlu diperluas dengan mekanisme nontunai yang terstandar; (2) mitra memerlukan pemahaman alur dan verifikasi transaksi; (3) keamanan akun serta kewaspadaan terhadap modus penipuan perlu diperkuat; dan (4) transaksi digital perlu masuk ke pencatatan penjualan. Kegiatan bertujuan memetakan kesiapan, mendampingi implementasi QRIS melalui saluran resmi, melatih transaksi, membangun prosedur keamanan, serta mengintegrasikan penerimaan digital dengan catatan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Pendampingan Transaksi Digital

Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif kepada pelaku UMKM di Desa Sukajaya. Mitra memberikan informasi mengenai pola pembayaran, perangkat, rekening atau akun yang digunakan, konektivitas, dan kebiasaan pencatatan. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator literasi dan simulasi. Aktivasi layanan diarahkan melalui penyelenggara jasa pembayaran berizin; tim tidak menyimpan PIN, OTP, kata sandi, atau data autentikasi milik mitra.

Alur Petakan Aktifkan Simulasikan Amankan Catat

Pelaksanaan dibagi dalam lima tahap yang menekankan kesiapan penggunaan, bukan hanya kepemilikan kode. Petakan menilai kebutuhan dan prasyarat. Aktifkan mendampingi pemilihan kanal resmi serta penempatan kode. Simulasikan melatih alur transaksi dari sisi pelanggan dan merchant. Amankan membentuk prosedur verifikasi serta respons insiden. Catat menghubungkan riwayat transaksi dengan pembukuan harian.

Tabel 1. Tahapan pendampingan implementasi QRIS

Tahap	Aktivitas utama	Luaran
Petakan	Identifikasi pola transaksi, perangkat, jaringan, akun, dan pencatatan	Peta kesiapan dan kebutuhan
Aktifkan	Fasilitasi pendaftaran melalui penyedia berizin dan penataan kode	Kesiapan penerimaan QRIS
Simulasikan	Latihan pemindaian, input nominal, pembayaran, dan verifikasi	Kemampuan menjalankan transaksi
Amankan	Edukasi PIN, OTP, bukti palsu, tautan, dan pengaduan	Prosedur transaksi aman

Materi Simulasi dan Evaluasi

Simulasi menggunakan skenario pembelian sederhana. Pelanggan memindai kode, memastikan nama merchant, memasukkan atau memeriksa nominal, menyetujui pembayaran, dan menunjukkan bahwa proses selesai. Merchant tidak berhenti pada tampilan pelanggan, tetapi memeriksa notifikasi atau riwayat pada aplikasi penerima. Apabila status belum diterima, barang tidak langsung diserahkan sebelum ada konfirmasi yang sah. Setelah transaksi, nominal dimasukkan ke catatan penjualan dan ditandai sebagai pembayaran QRIS.

Tabel 2. Indikator evaluasi kesiapan penggunaan QRIS

Dimensi	Indikator	Bukti evaluasi
Akses	Mitra mengetahui aplikasi dan kanal layanan resminya	Demonstrasi penggunaan
Operasional	Mitra mengikuti urutan transaksi dan memeriksa nominal	Simulasi transaksi
Verifikasi	Mitra memeriksa status pada sisi penerima	Observasi praktik
Keamanan	Mitra memahami kerahasiaan PIN, OTP, dan kredensial	Tanya jawab skenario
Pencatatan	Transaksi QRIS masuk ke catatan penjualan	Contoh format harian

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi partisipasi, demonstrasi ulang, respons terhadap skenario keamanan, pemeriksaan format pencatatan, dan dokumentasi kegiatan. Tidak dilakukan pretest-posttest kuantitatif atau audit transaksi jangka panjang. Oleh karena itu, hasil dinyatakan sebagai kesiapan dan pemahaman praktis, bukan peningkatan omzet atau inklusi keuangan yang telah terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Kesiapan Mitra

Pemetaan awal memperlihatkan bahwa penerapan pembayaran digital perlu mempertimbangkan tiga lapisan kesiapan. Lapisan teknis mencakup telepon pintar, nomor aktif, daya baterai, koneksi, dan aplikasi. Lapisan administratif mencakup identitas serta dokumen yang diminta penyelenggara. Lapisan operasional mencakup kemampuan memeriksa transaksi, memahami waktu penerimaan dana, menangani kendala, dan membuat catatan. Pemisahan ini membantu tim menghindari anggapan bahwa keberhasilan cukup ditandai oleh tercetaknya kode QR. Dialog dengan mitra juga menempatkan pembayaran tunai sebagai pilihan yang tetap dipertahankan. Implementasi QRIS diarahkan sebagai perluasan layanan. Pendekatan hibrida lebih sesuai dengan kondisi pelanggan yang beragam dan kemungkinan kendala jaringan. Keputusan ini penting agar digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru bagi pelanggan yang belum menggunakan aplikasi pembayaran.

Tabel 3. Peta kesiapan implementasi pembayaran digital

Aspek	Kebutuhan	Risiko jika diabaikan
Perangkat	Telepon aktif, baterai, koneksi, dan aplikasi	Notifikasi tidak dapat diperiksa
Administrasi	Data dan dokumen sesuai ketentuan penyedia	Aktivasi terhambat atau data tidak sesuai
Operasional	Pemahaman alur, nominal, status, dan penyelesaian	Kesalahan penerimaan transaksi
Keamanan	Kerahasiaan kredensial dan kanal pengaduan	Pengambilalihan akun atau penipuan
Pencatatan	Rekap tunai dan QRIS dalam periode yang sama	Omzet dan arus kas tidak terbaca utuh

Implementasi dan Simulasi Transaksi

Tahap implementasi dilakukan dengan mengarahkan mitra pada kanal resmi penyelenggara. Identitas merchant perlu diperiksa agar pelanggan dapat membandingkan nama yang muncul pada aplikasi dengan usaha yang dituju. Kode ditempatkan pada area transaksi yang mudah dilihat, tetapi tidak mudah diganti atau dimanipulasi pihak lain. Mitra didorong memeriksa kondisi kode secara rutin, terutama jika dicetak dan ditempel pada lokasi yang dapat diakses publik.

Simulasi menekankan kebiasaan verifikasi. Untuk kode statis, nominal yang dimasukkan pelanggan dibandingkan dengan harga transaksi. Setelah pembayaran, mitra memeriksa notifikasi atau riwayat pada aplikasi penerima. Langkah tersebut mengurangi ketergantungan pada tangkapan layar. Jika terjadi kegagalan, transaksi diulang hanya setelah status awal diperiksa agar tidak terjadi pembayaran ganda. Bukti serta waktu transaksi dicatat ketika diperlukan untuk penelusuran atau pengaduan.



Gambar 1. Pelaku UMKM dan tim pengabdian setelah pendampingan digitalisasi transaksi di Desa Sukajaya

Dokumentasi menunjukkan keterlibatan pelaku usaha dan tim dalam kegiatan pada lokasi mitra. Bukti tersebut mendukung terlaksananya pendampingan, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan transaksi. Luaran utama berada pada kesiapan operasional, pemahaman prosedur, serta integrasi pembayaran dengan pencatatan. Pendekatan ini selaras dengan OECD (2021) bahwa transformasi digital usaha kecil memerlukan kemampuan organisasi dan manusia selain akses terhadap teknologi.

Penguatan Keamanan Transaksi

Keamanan dibahas melalui skenario yang mungkin dihadapi mitra. Pada skenario pertama, pelanggan menunjukkan tangkapan layar pembayaran; tindakan yang benar adalah memeriksa status pada aplikasi merchant. Pada skenario kedua, seseorang meminta OTP dengan alasan membantu aktivasi; mitra harus menolak dan menghubungi kanal resmi. Pada skenario ketiga, nama merchant pada aplikasi pelanggan tidak sesuai; transaksi dihentikan dan kode diperiksa. Pada skenario keempat, tautan meminta pembaruan akun; mitra tidak memasukkan kredensial sebelum memverifikasi sumber.

Tabel 4. Prosedur aman dalam penerimaan QRIS

Situasi	Tindakan yang disarankan	Tujuan
Sebelum transaksi	Periksa kode, aplikasi, koneksi, dan nama merchant	Mencegah salah tujuan pembayaran
Saat pembayaran	Cocokkan nominal dan jangan meminta PIN pelanggan	Menjaga ketepatan serta privasi
Sesudah pembayaran	Periksa notifikasi atau riwayat pada sisi merchant	Memastikan dana berstatus berhasil
Permintaan OTP	Tolak dan hubungi kanal resmi penyedia	Mencegah pengambilalihan akun
Transaksi bermasalah	Simpan waktu, nominal, referensi, dan ajukan pengaduan	Memudahkan penelusuran

Prosedur aman perlu dijadikan kebiasaan harian. Mitra disarankan mengaktifkan pengamanan perangkat, memperbarui aplikasi melalui toko resmi, membatasi akses telepon yang digunakan untuk usaha, dan tidak mencampurkan kredensial dengan catatan yang mudah terlihat. Jika perangkat hilang, langkah pertama adalah mengamankan nomor, akun, serta akses aplikasi melalui penyedia terkait. Edukasi juga menekankan bahwa tim pendamping atau pihak lain tidak berhak meminta PIN dan OTP.

Integrasi dengan Pencatatan Penjualan

Riwayat transaksi elektronik membantu penelusuran, tetapi tidak menggantikan catatan usaha yang menggabungkan seluruh metode pembayaran. Tim memperkenalkan format sederhana berisi tanggal, uraian produk, nilai penjualan tunai, nilai QRIS, biaya terkait jika ada, dan total. Pada akhir hari, catatan dibandingkan dengan uang tunai serta riwayat aplikasi. Selisih perlu ditelusuri berdasarkan waktu dan nominal transaksi.

Pencatatan tersebut memisahkan omzet dari saldo rekening. Dana yang masuk dapat terpengaruh waktu penyelesaian dan biaya sesuai kebijakan yang berlaku. Karena ketentuan biaya dapat berubah dan bergantung pada kategori atau penyelenggara, mitra diarahkan

membaca informasi tarif terbaru pada kanal resmi, bukan mengandalkan angka yang diingat dari pelatihan. Sikap ini penting agar artikel dan materi pendampingan tidak membuat informasi finansial cepat kedaluwarsa.

Tabel 5. Format ringkas pencatatan transaksi harian

Tanggal	Uraian	Tunai	QRIS	Biaya	Total penjualan
[tanggal]	Penjualan produk	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Rekonsiliasi	Cocokkan uang, aplikasi, dan catatan				Selisih: Rp...

Capaian dan Keterbatasan

Capaian kegiatan meliputi terpetakannya kebutuhan mitra, terlaksananya pendampingan implementasi, dipahaminya alur transaksi dan verifikasi, tersusunnya prosedur keamanan, serta diperkenalkannya pencatatan pembayaran. Kekuatan kegiatan terletak pada penggabungan aspek teknologi, perilaku aman, dan pengelolaan usaha. QRIS tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperluas pilihan pembayaran dan menghasilkan data transaksi yang dapat dikelola.

Keterbatasan kegiatan adalah belum tersedianya data jumlah transaksi sebelum dan sesudah, nilai penjualan, kegagalan transaksi, kepuasan pelanggan, serta penggunaan berulang dalam periode panjang. Dokumentasi tidak memperlihatkan detail kredensial atau data transaksi karena informasi tersebut bersifat sensitif. Penelitian lanjutan dapat menggunakan log agregat dengan persetujuan mitra, wawancara pelanggan, dan pengamatan satu hingga tiga bulan untuk menilai adopsi, kemudahan, keamanan, serta dampak operasional.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan memerlukan pemantauan sederhana. Mitra dapat merekap jumlah dan nilai transaksi QRIS per minggu, mencatat kendala, mengecek perubahan biaya pada kanal resmi, serta meninjau keamanan kode. Tim desa atau mahasiswa dapat melakukan kunjungan tindak lanjut untuk memastikan akun masih dapat diakses dan catatan penjualan dijalankan. Jika penggunaan rendah, evaluasi perlu menanyakan apakah penyebabnya berasal dari preferensi pelanggan, konektivitas, posisi kode, atau kurangnya komunikasi bahwa pembayaran QRIS tersedia.

Pengembangan berikutnya dapat menghubungkan QRIS dengan katalog digital, nomor usaha, label produk, dan pembukuan sederhana. Namun, ekspansi sebaiknya dilakukan bertahap agar mitra tidak terbebani banyak aplikasi. Prinsip utamanya adalah teknologi yang dipilih harus menyelesaikan kebutuhan, dapat dipahami, aman, dan memberikan informasi yang berguna bagi keputusan usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Sukajaya memperkuat digitalisasi transaksi UMKM melalui pendampingan implementasi QRIS yang mencakup kesiapan, aktivasi melalui saluran resmi,

simulasi, keamanan, dan pencatatan. Alur Petakan–Aktifkan–Simulasikan–Amankan–Catat membantu menempatkan kode QR sebagai bagian dari proses bisnis. Mitra diarahkan untuk memeriksa identitas serta nominal, mengonfirmasi status melalui aplikasi penerima, melindungi kredensial, menangani kendala melalui kanal resmi, dan mencatat transaksi bersama penerimaan tunai.

QRIS berfungsi sebagai alternatif yang melengkapi pembayaran tunai dan berpotensi meningkatkan fleksibilitas layanan. Namun, kegiatan belum membuktikan peningkatan omzet, jumlah pelanggan, atau inklusi keuangan karena belum dilakukan pengukuran jangka panjang. Tindak lanjut perlu mencatat volume serta nilai transaksi, pengalaman pelanggan, selisih pencatatan, gangguan, dan informasi biaya secara berkala. Dengan pendampingan berkelanjutan, digitalisasi dapat berkembang dari kepemilikan alat menjadi praktik transaksi yang aman dan berguna bagi pengelolaan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pelaku UMKM Desa Sukajaya atas keterlibatan dalam pemetaan, simulasi, dan penyusunan prosedur transaksi. Apresiasi disampaikan kepada Universitas Bina Bangsa, pemerintah dan masyarakat Desa Sukajaya, serta pihak penyelenggara layanan yang mendukung proses sesuai kewenangannya. Kolaborasi tersebut memungkinkan kegiatan berfokus pada kebutuhan nyata dan keamanan mitra.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2019a). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019b). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Quick Response Code Indonesian Standard*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>
- OECD. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>